



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/047.d /SK/KIP/2012**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM KECAMATAN BLANGPIDIE
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/046/SK/KIP/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012;

Memperhatikan : 1. Surat PPS tentang Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) Nomor 01/PPS/VI/2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Kecamatan Blangpidie pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012;
- KEDUA : Memberhentikan dan Mengangkat/Menetapkan Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) dalam Kecamatan Blangpidie pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertugas :
 - a. Mengumumkan dan Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikasi hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Aceh, KIP kabupaten /Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;

- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 4 Juni 2012


**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KETUA,



Tembusan :

1. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
2. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
3. Panwas Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Panwas Kecamatan Blangpidie di Blangpidie i susoh;
5. Ketua PPK Blangpidie di Blangpidie ;
6. Yang bersangkutan.

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KPPS DALAM KECAMATAN BLANGPIDIE
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012**

No	Nama KPPS lama	Nama KPPS baru	Gampong/TPS	Ket
1	MUKHTAR.Y	SAYUTI.Spd	SEUNALOH TPS I	
2	Drs. SYAFWAL	MUHIBBUDIN	GEULUMPANG PAYONG/ TPS I	
3	MARDIANTO	MARWAN SYAH PUTRA	MEUDANG ARA/ TPS V	
4	SYAFWAN BA	RAISMIADI	MEUDANG ARA/ TPS V	
5	JEFRI SAPUTRA	FITRI SURYANI	MEUDANG ARA/TPS II	
6	FAUZI ALI	CUT ROSMANIAR	MEUDANG ARA/TPS II	
7	DONNI PRATAMA	SAFRIZAL	MEUDANG ARA/TPS IV	
8	SRI HERMA YUSRIDAR.MY	SYARIFAH SALWA WILKA	PASAR BLANGPIDIE /TPS I	
9	NOVA ROVITA	MARDIANA	PASAR BLANGPIDE /TPS II	
10	SUBKI	HASBI YUSUF	GP. GUHANG/TPS I	
11	M.NASIR	ASMADI	ALUE MANGGOTA/ TPS II	
12	ZIKRI	ERIZAL	MATA IE/ TPS IV	
13	SARDIANA SALFIA	A.QADIR S. SIANtar	KUTA TUHA/TPS III	

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 4 Juni 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KETUA,

